

Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar

Sitti Sahara Syamel¹, Jusman², Abd Rahman³, Hermawati Mappiwali⁴, Tri Cahyo Nugroho⁵

^{1,2,3,4,5} Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar

Email : sittisahara@handayani.ac.id

Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang dipegangnya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan analisis dampak kebijakan sertifikasi guru di dinas pendidikan kota Makassar khususnya di sekolah menengah kejuruan negeri 5 makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru membawa pengaruh positif bagi guru-guru yang ada di sekolah menengah kejuruan negeri 5 Makassar. Dengan adanya sertifikasi guru banyak guru yang mempunyai tingkat kemampuan kompetensi yang minim dapat lebih meningkatkan lagi kompetensinya menjadi lebih maksimal. Sertifikasi guru juga dapat memotivasi para guru untuk bekerja lebih baik lagi karena guru-guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dituntut untuk menjadi seorang guru professional.

Kata Kunci: Dampak, Sertifikasi, Kebijakan, Guru, Dinas Pendidikan

ABSTRACT

Indonesia needs people who can think effectively, efficiently and productively. This can be realized if we have reliable educators who are able to produce a generation of smart and moral people. The certification policy for teachers and lecturers is indeed a strategic step to improve the quality of education in Indonesia. Formally, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards state that teachers are professionals. As professionals, teachers are required to have academic qualifications of S-1 (first degree) or D-4 (fourth diploma) in a field relevant to the subject they hold and master competencies as learning agents. Based on this, researchers are encouraged to try to

describe and explain evaluation The impact of the teacher certification policy in the Makassar city education office, especially in Makassar 5 state vocational high schools. The type of research used is descriptive with the data analysis used is qualitative data analysis. Meanwhile, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that the evaluation of the teacher certification policy has had a positive influence on teachers at Makassar 5 state vocational high schools. With teacher certification, many teachers who have a minimal level of competence can further increase their competence to a maximum level. Teacher certification can also motivate teachers to work better because teachers who have received an educator certificate are required to become professional teachers.

Keywords: *Impact, Certification, Policy, Teachers, Education Department*

PENDAHULUAN

Kehidupan suatu bangsa erat sekali kaitannya dengan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan seseorang agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya, keluarganya, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat substansial. Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral.

Menurut Martini dalam (Pardede & Yafizham, 2020) Mutu pendidikan di Indonesia masih bisa dikatakan berkualitas rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Oleh sebab itu syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu/berkualitas adalah guru yang profesional, karena guru adalah ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal. Guru adalah sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik merupakan keharusan yang memerlukan penanganan serius.

Mulayasa dalam (Andika et al., 2022) menyatakan bahwa “keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran”. Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya, seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi. UU No. 14 tahun 2005 dalam (Bintoro & Fitrianto, 2019) mengatakan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pekerjaan profesional yang disandang oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru.

Lanjut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Muamar, 2017)

Penjelasan tersebut dipahami bahwa guru atau tenaga pendidik merupakan salah satu pilar utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, disamping itu juga guru merupakan aspek penting dalam pendidikan yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan sebuah proses pengembangan diri menjadi lebih baik, berkarakter serta memberikan nilai yang tidak akan pernah dihitung jasanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru merupakan motor penggerak roda pengembangan sumber daya manusia menuju sebuah aspek kehidupan menjadi lebih baik. Namun pada aspek lainnya kebutuhan guru dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya butuh dorongan dan motivasi dari pemerintah dengan memberikan sebuah kebijakan yang dapat menunjang kehidupannya, oleh sebab itu berkembangnya sebuah pemikiran seseorang tergantung juga dari kualitas yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik

dan hal tersebut sangat dipengaruhi dengan adanya sebuah kebijakan yang dapat menjadi jembatan oleh tenaga pendidik untuk lebih profesional.

Regulasi yang digulirkan pemerintah juga tidak hanya berkaitan dengan fisik melainkan berkaitan pula dengan pemberdayaan guru karena disadari sepenuhnya bahwa betapapun lengkap sarana pendidikan, dana yang mencukupi, input (siswa) yang berkualitas, pemimpin (kepala sekolah) yang profesional, staf administrasi (tata usaha sekolah) yang handal, akan tetapi tanpa guru yang kompeten dan profesional, maka tetap tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang optimal karena guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar.

Pembicaraan kebijakan pendidikan tentunya tidak lepas dari pembahasan sertifikasi guru yang saat ini menjadi bahan pembicaraan di dunia pendidikan. Berbagai macam asumsi terkait kebijakan sertifikasi guru baik guru PNS maupun GTY (Guru Tetap Yayasan) bermunculan di masyarakat. Kebijakan sertifikasi guru ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kesejahteraan kepada guru. Selain itu, sertifikasi guru juga diperuntukkan bagi guru yang sudah lama mengabdikan dan sudah lulus uji kompetensi ataupun PLPG. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa dalam (Anjarsari, 2022) yang menjelaskan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat atau pengakuan guru tersebut telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan Mulyasa dalam (Manafe et al., 2023) Kompetensi guru (kemampuan pendidik), yaitu kombinasi dari kemampuan perseorangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial maupun spiritual sehingga menjadi pembentuk kemampuan standar, seperti menguasai materi, memahami siswa, sebagai pembelajar, dan mampu mengembangkan pribadi maupun profesionalisme.

Pada penjelasan tersebut dianalisa bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, serta mampu menjadikan acuan secara signifikan dalam mengembangkan metode pembelajaran agar siswa mampu meningkatkan minat belajarnya, disamping itu kompetensi guru juga sangatlah berpengaruh pada metode yang digunakan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang dimilikinya, namun hal tersebut masih banyak didapati guru belum sepenuhnya mempunyai kompetensi secara baik karena masih ada beberapa guru yang belum melek akan teknologi sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan untuk meminimalisir dan memperoleh informasi dari kebijakan sertifikasi tersebut. Fatkuroji dalam (Elwijaya et al., 2021) Kebijakan

pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanah & Kristiawan dalam (Nawawi, 2022) bahwa program sertifikasi merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan, yang secara rasional apabila kompetensi guru bagus maka akan diikuti dengan penghasilan bagus dan sebaliknya, diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Informasi yang diperoleh oleh penulis berkaitan dengan evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru di Dinas pendidikan Kota Makassar khususnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, masih banyak guru yang telah bersertifikat pendidik memiliki kemampuan penguasaan informasi teknologi yang minim, yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan internet. Sehingga hal tersebut dapat memperhambat kinerjanya. Bukan hanya itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, guru yang telah bersertifikat pendidik harus memiliki jam mengajar sebanyak 24 jam dalam satu minggu. Akan tetapi kenyataannya ada beberapa guru yang telah bersertifikat pendidik belum memenuhi ketentuan tersebut. Dan guru tersebut diberikan kesempatan untuk dapat mencari jam mengajar di sekolah lain untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tapi kenyataannya dilapangan, kinerja guru belum maksimal sehingga program kebijakan sertifikasi guru tidak korelasi dengan kinerja guru. Sehubungan dengan hal di atas maka perlu mengadakan kajian mengenai evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru.

METODE

Bagian ini akan menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan melalui penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan permasalahan secara jelas tentang evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. Tipe penelitian ini studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. Fokus penelitian dan informan ini berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan sesuai dengan konseptual di atas maka peneliti mengambil informan sebanyak 7 orang yang terbagi dalam 4 guru program keahlian yang ada yang terbagi dalam 1 guru kompetensi keahlian konstruksi bangunan, 1 guru kompetensi keahlian teknik

pemesinan, 1 guru kompetensi keahlian teknik pengelasan, 1 guru kompetensi keahlian teknik mekanik alat berat dan 3 guru mata pelajaran umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Menurut Lester dan Stewart dalam (Ulin, 2015) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju.

Jika mengacu pada peraturan pemerintah maka Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu dalam peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompotensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Untuk menguji kompetensi guru berdasarkan dengan asas serifikasi yang didapatkan maka perlu dilakukan kajian yang mendukung dalam penelitian ini sejauh mana tingkat keberhasilan tenaga pendidik sebagai ukuran setelah melakukan sertifikasi guru

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pendidikan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Berbagai konsep efektifitas yang ada baik berupa dengan pendapat para ahli yang pada intinya tetap mengavu pada titik pencapaian yang dilakukan oleh seorang individu ataupun organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan. Oleh sebab itu efektifitas merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian tujuan dari suatu program kebijakan dalam sertifikasi guru hal ini dapat kita lihat hasil kutipan informan M.T selaku wakil kepala sekolah mengatakan :

“Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, dalam hal ini pemberian sertifikasi kepada guru-guru sangatlah membantu guru – guru menjadi lebih baik khususnya dalam proses belajar mengajar. Sertifikasi guru juga membantu mensejahterakan guru karena sebelum mendapatkan sertifikasi, banyak guru yang mendapatkan gaji yang sangat minim.”

Hasil kutipan dengan bapak M.T kalau kita hubungkan dengan teori yang diatas mengenai efektivitas maka dapat diketahui efektivitas dari suatu program kebijakan akan berjalan dengan baik jika program kebijakan tersebut betul-betul membawa pengaruh positif terhadap masyarakat, dalam hal ini program pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi dapat membantu meningkatkan mutu guru khususnya dalam proses belajar mengajar dan mensejahterakan kehidupan guru dengan bertambahnya tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. berbeda halnya Kutipan wawancara oleh bapak B selaku staf pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar mengenai program pemerintah dalam kebijakan sertifikasi guru dapat dilihat :

”Bahwa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, sertifikasi guru tidak terlalu berpengaruh untuk meningkatkan mutu guru karena masih banyak guru yang memiliki tingkat kemampuan yang minim khususnya dalam proses belajar mengajar dan tidak terlalu mensejahterakan guru karena pembayaran sertifikasi tidak tepat waktu dan selalu tertunda-tunda”

Hasil kutipan dengan bapak B maka dapat diketahui bahwa teori yang diutarakan diatas berbeda dengan hasil kutipan dengan wakil kepala sekolah. Masih ada guru-guru yang memiliki kemampuan penguasaan informasi teknologi yang minim sehingga menyebabkan

kinerja guru tersebut tidak maksimal. Hasil pengamatan peneliti di lapangan mengenai evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru mengenai efektivitas kinerja guru setelah mendapatkan sertifikat pendidik, masih ada beberapa guru yang memiliki tingkat kemampuan penguasaan informasi yang minim. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang telah dilaksanakan, hampir semua guru mendapatkan nilai dibawah rata-rata. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa program pemerintah dalam kebijakan sertifikasi guru tidak semuanya mampu meningkatkan mutu guru menjadi lebih baik khususnya dalam proses belajar mengajar.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi menjadi salah satu teori untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan sertifikasi guru. Tingkat efisiensi yang diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan membawa pengaruh yang positif terhadap masyarakat khususnya bagi para guru yang ada di kota Makassar terlebihnya lagi bagi guru-guru yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. Efisiensi menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan suatu program kebijakan khususnya program kebijakan sertifikasi guru. Kutipan Wawancara oleh bapak A selaku staf pengajar pada jurusan mesin dapat dilihat:

“Untuk mendapatkan sertifikasi guru, saya telah mengurus banyak hal untuk melengkapi berkas-berkas yang akan diserahkan ke kantor Dinas Pendidikan, dan itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Dan hasil yang kami dapatkan dari sertifikasi ini meawakan hasil yang positif bagi kami.”

Hasil Kutipan wawancara dengan bapak A, kalau kita hubungkan dengan teori efisiensi khususnya dalam program pemerintah dalam kebijakan sertifikasi guru tidak sepenuhnya efisien karena banyak hal yang harus dilakukan oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Tidak sedikit waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh seorang guru untuk mengantongi sertifikat pendidik. Sertifikasi sangatlah efisien bagi para guru karena dengan adanya sertifikasi membawa pengaruh yang positif bagi mereka ke depannya.

3. Responsivitas

Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara

yang efisien dalam memmanage atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini mengetahui bagaimana teori ini melihat dampak dari kebijakan sertifikasi guru, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik khususnya dalam menanggapi dampak terhadap kebijakan sertifikasi guru di kota Makassar. Hasil kutipan wawancara oleh bapak S.I, selaku salah satu staf penajar pada jurusan Bangunan dapat dilihat :

“Program pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru dalam hal ini yaitu program kebijakan sertifikasi guru, sangatlah baik. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap guru-guru. Pemberian sertifikat pendidik atau pemberian tunjangan 1 bulan gaji pokok sangatlah berguna bagi guru, gaji guru yang sangat minim belum mampu mensejahterakan guru-guru tapi dengan adanya tunjangan sertifikasi pendapatan guru mulai bertambah dan mampu untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan para guru. Dengan begiru tingkat kinerja guru akan semakin maksimal”

Hasil Kutipan wawancara dengan bapak S.I selaku salah satu staf pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, jika dihubungkan dengan teori responsivitas yang merupakan kemampuan pemerintah untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu Negara khususnya di kota Makassar dalam hal ini untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Kebijakan sertifikasi dianggap mampu untuk membantu para guru untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraannya dengan diadakannya berbagai program kegiatan pasca diklat sertifikasi yang diperuntukkan untuk memaksimalkan kinerja guru dan pemberian “reward” dalam hal ini pemberian tunjangan sebesar 1 bulan gaji pokok. Hal ini membawa respon yang positif terhadap para guru di Kota Makassar khususnya terhadap guru-guru yang berada di bawah naungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar.

4. Ketepatan

Ketepatan merupakan salah satu teori yang tidak kalah pentingnya. Makasimalnya siatu program kebijakan akan menjadi baik jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam hal iniketepatan program pemerintah dalam hal kebijakan sertifikasi guru terhadap para guru yang ada di kota Makassar khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran

utamanya. Sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah atau para pengambil kebijakan harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi masalah dan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kutipan wawancara oleh Bapak M, selaku salah satu staf pengajar pada jurusan Mesin di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar dapat dilihat :

”Kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru . dengan adanya sertifikasi banyak guru yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi yang minim mampu untuk belajar agar kemampuan itu menjadi maksimal karena diharuskan setiap guru untuk mampu mengoperasikan teknologi informasi dalam hal ini mampu mngoperasikan komputer. Tunjangan sertifikasi juga mampu mensejahterakan guru”

Hasil Kutipan wawancara dengan bapak M, kemudian kita hubungkan dengan teori ketepatan maka dapat diketahui ketepatan dari program kebijakan sertifikasi, pemerintah di anggap mampu mengetahui apa yang menjadi masalah terhadap guru-guru di Indonesia khususnya di kota Makassar. kebijakan sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diharapkan mampu menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswanya. Pemberian tunjangan sertifikasi juga mampu mensejahterakan guru pendapatan guru yang dulunya sangat minim dan sekarang dengan adanya tunjangan sertifikasi pendapatan guru mulai meningkat.

5. Dampak Kinerja Sertifikasi

Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki. Dampak yang terjadi tentu sangat tergantung dengan kebijakan maupun programnya. Dalam realita di lapangan, merumuskan indikator dampak tidak mudah dilakukan. Luasnya cakupan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah untuk ditangani membuat evaluator harus cermat memilih indikator yang akan digunakan khususnya dalam kebijakan sertifikasi guru di kota Makassar.

Terdapat beberapa indikator kinerja guru. Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Olehnya itu dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator kinerja guru antara lain:

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kinerja guru yaitu kemampuannya dalam membuat perencanaan dan persiapan mengajar. Dengan adanya kemampuan tersebut maka setiap guru mampu membuat perencanaan dan mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar. Hasil Kutipan wawancara yang dikatakan oleh bapak W.H.W, selaku salah satu staf pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar dapat dilihat :

“Dengan adanya kebijakan sertifikasi ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan mutu guru yang dulunya mempunyai tingkat kemampuanyang minim tapi karena dituntut untuk memiliki kemampuan yang maksimal, para guru mampu belajar sesuai dengan tuntutan diembankan kepadanya sebagai seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.”

hasil Kutipan dengan bapak W.H.W jika dikaitkan dengan teori dampak tidak langsung dari kebijakan sertifikasi guru maka dapat diketahui kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan ini khususnya kebijakan sertifikasi berjalan dengan baik. Dengan adanya kebijakan sertifikasi ini, para guru mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru yang dulunya minim tapi karena dengan diadakannya berbagai program peningkatan mutu guru pasca diklat sertifikasi membantu para guru menjadi lebih baik lagi.

Jika kita hubungkan dengan teori yang sebelumnya yaitu teori efektifitas, maka dengan adanya kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi bagi para guru. Kebijakan sertifikasi dinilai efektif karena para guru telah diwajibkan untuk mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut para guru sudah mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa nantinya.

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa

Kebijakan sertifikasi juga menuntut guru agar mampu menguasai setiap materi pelajaran yang akan dibawakan. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa juga merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kinerja guru. Materi yang dibawakan jika dikuasai oleh guru maka akan muda bagi guru tersebut untuk menjelaskan kepada siswa. Dan juga siswa mampu memahami lebih baik materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Kutipan wawancara yang dikatakan oleh Ibu A.M, selaku salah satu staf pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar dilihat :

”Semua guru dituntut untuk menguasai materi bahan ajar, karena untuk mengajar siswa para guru harus terlebih dahulu memahami bahan ajar yang akan dibawakannya. Dengan begitu para guru tidak susah payah untuk menjelaskan materi bahan ajar karena telah menguasainya.”

Hasil Kutipan wawancara dengan ibu A.M, jika kita hubungkan dengan teori efisien maka kebijakan sertifikasi sangatlah efisien karena bukan hanya guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik tapi semua guru dituntut untuk menguasai materi bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada guru-guru yang di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Bukan hanya perhatian terhadap guru tapi juga perhatian terhadap siswa-siswa yang akan menjadi penerus berikutnya.

c. Penguasaan Metode dan Strategi Mengajar

Kebijakan sertifikasi juga mampu membantu para guru untuk mengetahui atau mempelajari metode dan strategi mengajar yang baik. Penguasaan metode dan strategi mengajar yang baik juga merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kinerja guru. Seperti yang diutarakan oleh bapak M.D, selaku salah satu staf pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar dapat dilihat :

“Metode mengajar yang dulu digunakan adalah metode ceramah, metode ini sangatlah kurang efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Tapi setelah mengikuti sertifikasi metode tersebut sudah tidak begitu digunakan. Metode yang digunakan sudah mulai meningkat karena para guru dituntut untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih dalam proses belajar mengajar. Seperti menggunakan laptop dan proyektor agar siswa mampu lebih mengerti dan memahami materi tersebut”

Hasil kutipan wawancara diatas jika kita hubungkan dengan teori responsifitas dan ketepatan, kebijakan sertifikasi guru membawa pengaruh positif terhadap pendidikan di Indonesia khususnya di kota Makassar. Respon para guru terhadap kebijakan sertifikasi sangatlah baik. Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, Para guru mampu lebih meningkatkan penguasaan metode dan strategi mengajar yang lebih baik dari sebelumnya. Ketepatan merupakan salah satu teori yang tidak kalah pentingnya maksimalnya suatu kebijakan akan menjadi lebih baik jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa program pemerintah bagi pendidikan yaitu kebijakan sertifikasi guru sangatlah baik karena dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, maka para guru akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi

kedepannya khususnya dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya motivasi yang muncul maka produktifitas kinerja guru akan semakin meningkat yang dulunya kinerja guru sangat menurun karena kurangnya perhatian pemerintah kepada nasib para guru. Tapi dengan adanya kebijakan sertifikasi guru maka para guru semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Kebijakan sertifikasi merupakan salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru di Indonesia khususnya di kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar mengenai dampak kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, sudah berjalan sebagai mana mestinya. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian penulis yaitu Hasil evaluasi kebijakan sertifikasi guru maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

Indikator yang pertama yaitu efektivitas dari suatu program atau kebijakan akan berjalan dengan baik jika kebijakan tersebut membawa pengaruh positif terhadap masyarakat khususnya dalam hal ini kebijakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru dapat membantu meningkatkan mutu guru dalam hal kemampuannya dalam proses belajar mengajar. Indikator yang kedua yaitu efisiensi dari kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru dirasakan kurang efisien karena untuk mendapatkan tidak mudah bagi para guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Para guru harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya yang lumayan besar untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berkat adanya sertifikasi guru ini hasil yang para guru dapatkan dari salah satu kebijakan pemerintah ini adalah membawa pengaruh positif bagi para guru. Indikator yang ketiga yaitu Responsivitas dari kebijakan sertifikasi guru dianggap berhasil, karena pemerintah mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan para guru di Indonesia khususnya di kota Makassar. Adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru di terima positif oleh kalangan guru. Dengan adanya sertifikasi guru ini kemampuan guru mulai meningkat dalam penguasaan teknologi informasi yang dulunya sangat minim dan pendapatan yang bertambah untuk membiayai kehidupan keluarga para guru. Indikator yang keempat yakni ketepatan suatu kebijakan akan mudah didapat jika kebijakan tersebut tepat pada sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tidak

semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran utamanya, akan tetapi kebijakan sertifikasi guru dinilai sudah tepat pada sasaran utamanya yaitu untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Kebijakan sertifikasi mampu meningkatkan kemampuan guru khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan juga tunjangan sertifikasi yang mampu mensejahterakan keluarga para guru.

Dampak dari kebijakan sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap para guru di kota Makassar khususnya guru-guru yang berada di bawah naungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar membawa pengaruh positif. Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru ini mampu meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Guru yang dulunya memiliki tingkat penguasaan teknologi informasi yang minim sekarang menjadi lebih baik karena pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru tersebut. Bukan hanya itu, pemberian tunjangan sertifikasi kepada guru-guru dapat meningkatkan pendapatan guru dengan begitu tingkat kesejahteraan guru mulai meningkat dengan diterimanya tunjangan sertifikasi.

REFERENSI

- Andika, A., Nurdin, E. S., Ruyadi, Y., Indonesia, U. P., & Indonesia, U. P. (2022). a Policy Analysis of English Teacher Certification. *Jurnal Penelitian*, 6, 86–94.
- Anjarsari, R. (2022). Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*, 8(2), 163–173.
- Bintoro, R. F. A., & Fitrianto, Y. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.47>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). *Konsep dasar kebijakan pendidikan*. 6(1), 67–71.
- Manafe, H. A., Goru, R., Naen, A. B., & Hebi, M. (2023). *Dampak Sertifikasi Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Melalui Kompetensi Guru Sebagai Pemoderasi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan)*. 4(1), 300–314.
- Muamar. (2017). Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madaniyah*, 1, 23–50.
- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi, Motivasi Dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu ...*, 3(1), 323–336. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/878%0Ahttps://dinastirev.org/JMPIS/article/do>

wnload/878/569

Pardede, Z. H., & Yafizham. (2020). Dampak Efektivitas Program Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Sman 3 Padang Sidempuan. *Visipena Journal*, 11(1), 33–45. <https://doi.org/10.46244/visipena.v11i1.1027>

Ulin, F. (2015). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KOTA PONTIANAK. *Governance Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4, 1–17.